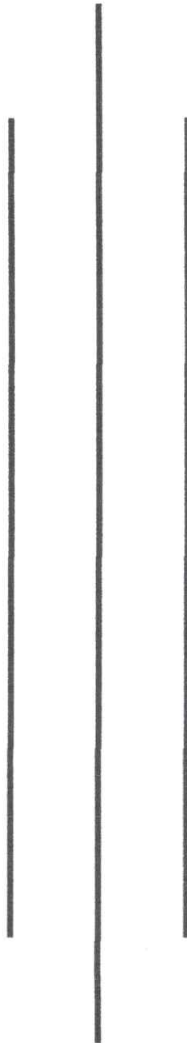




PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DENPASAR



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TA 2023

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	4
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	4
1.3. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan.....	4
BAB II INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI	7
2.1. Entitas Pelaporan.....	7
2.2. Entitas Akuntansi	7
BAB III EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	9
3.1. Ekonomi Makro.....	9
3.2. Kebijakan Keuangan	9
3.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	10
BAB IV IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	12
4.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	12
4.2. Pergeseran Anggaran.....	13
BAB V KEBIJAKAN AKUNTANSI	14
5.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah.....	14
5.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	14
5.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	15
5.4. Ringkasan Penerapan Kebijakan Akuntansi Akun yang Penting Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	15
5.4.1. Kas dan Setara Kas	15
5.4.2. Piutang.....	15
5.4.3. Persediaan.....	15
5.4.4. Aset Investasi	16
5.4.5. Aset Tetap.....	16
5.4.6. Aset Lain-Lain.....	17

5.4.7.	Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO	17
5.4.8.	Belanja dan Beban.....	18
BAB VI PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN		19
6.1.	Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	19
6.1.1.	Pendapatan-LRA	19
6.1.2.	Belanja.....	19
6.1.3.	Transfer	22
6.1.4.	Penerimaan Pembiayaan.....	22
6.1.5.	Pengeluaran Pembiayaan.....	22
6.1.6.	SILPA.....	22
6.2.	Pos-Pos Neraca.....	23
6.2.1.	Aset.....	23
6.2.2.	Kewajiban.....	25
6.2.3.	Ekuitas.....	26
6.3.	Pos-Pos Laporan Operasional	26
6.3.1.	Pendapatan-LO.....	26
6.3.2.	Beban.....	26
6.4.	Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	28
6.4.1.	Ekuitas Awal	28
6.4.2.	Surplus (Defisit) LO	28
6.4.3.	Ekuitas Akhir.....	28
BAB VII PENUTUP		29
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan dana
- b. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran
- c. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

1.3. Sistematika penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan Atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

- Bab II Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
 - 2.1. Entitas Pelaporan
 - 2.2. Entitas Akuntansi
- Bab III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Target kinerja APBD Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar
 - 3.1. Ekonomi Makro
 - 3.2. Kebijakan Keuangan
 - 3.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- Bab IV Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 4.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 4.2. Pergeseran Anggaran
- Bab V Kebijakan Akuntansi
 - 5.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah
 - 5.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 5.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 5.4. Ringkasan Penerapan Kebijakan Akuntansi Akun yang Penting Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
 - 5.4.1. Kas dan Setara Kas
 - 5.4.2. Piutang
 - 5.4.3. Persediaan
 - 5.4.4. Aset Investasi
 - 5.4.5. Aset Tetap
 - 5.4.6. Aset Lain-lain
 - 5.4.7. Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO
 - 5.4.8. Belanja dan Beban
- Bab. VI Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
 - 6.1. Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 6.1.1. Pendapatan-LRA
 - 6.1.2. Belanja
 - 6.1.3. Transfer
 - 6.1.4. Penerimaan Pembiayaan
 - 6.1.5. Pengeluaran Pembiayaan
 - 6.1.6. SILPA
 - 6.2. Pos-Pos Neraca
 - 6.2.1. Aset
 - 6.2.2. Kewajiban

6.2.3. Ekuitas

6.3. Pos-Pos Laporan Operasional

6.3.1. Pendapatan-LO

6.3.2. Beban

6.4. Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

6.4.1. Ekuitas Awal

6.4.2. Surplus (Defisit) LO

6.4.3. Ekuitas Akhir

Bab. VII Penutup

BAB II

INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

2.1. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan Pemerintah Daerah menyusun laporan keuangan konsolidasian dari gabungan seluruh laporan keuangan gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selanjutnya ditambah laporan yang berasal dari Penyelenggara Pejabat Pengelolaan keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Entitas Pelaporan satuan kerja perangkat daerah menyusun laporan keuangan dari gabungan seluruh laporan keuangan entitas akuntansi seperti unit kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

2.2. Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi merupakan setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Perusahaan Daerah pada dasarnya adalah suatu entitas akuntansi, namun akuntansi dan penyajian laporannya tidak menggunakan standar akuntansi pemerintahan, tetapi menggunakan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Setiap unit pemerintah dapat ditetapkan menjadi suatu entitas akuntansi apabila unit yang dimaksud mengelola anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam PSAP 11 paragraf 12 yang mengatakan: "Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan".

Pada pemerintah daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah harus diperlakukan sebagai entitas akuntansi yang terpisah dengan entitas akuntansi yang lain. Untuk itu masing-masing OPD mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan OPD. Selain itu apabila suatu entitas akuntansi yang karena penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah dapat

ditetapkan sebagai entitas pelaporan dan bukan sebagai entitas akuntansi seperti pengertian diatas sebagai contoh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yaitu badan yang dibentuk pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan Negara yang dipisahkan. Termasuk dalam Badan Layanan Umum adalah rumah sakit daerah. Laporan keuangan BLUD akan disampaikan ke entitas pelaporan yang membawahi BLU dimaksud dan akan digabungkan dalam Laporan Keuangan entitas pelaporan.

BAB III

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

3.1. Ekonomi Makro

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka pada tahun 2017 dibentuklah Lembaga/Instansi baru di Kota Denpasar yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dan dipimpin oleh Kepala Badan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan, serta mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kota Denpasar, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar mempunyai tugas dalam menyelenggarakan fungsi.

Adapun Fungsi Balitbang Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan teknis Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kota.
- b. Menyusun perencanaan program dan anggaran Penelitian dan Pengembangan di Pemerintah Kota.
- c. Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan di Pemerintah Kota.
- d. Melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintah Daerah Kota Denpasar.
- e. Memfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah.
- f. Memantau, evaluasi dan membuat laporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kota Denpasar.
- g. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Pemerintah Kota.
- h. Melaksanakan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Kota Denpasar.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

3.2. Kebijakan Keuangan

Dalam proses pembangunan dan perkembangan perekonomian di daerah, pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui APBD memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian. Oleh karena itu, proses penyusunan APBD semaksimal mungkin harus dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi

sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu, disiplin dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran merupakan hal penting agar anggaran tersebut dapat berfungsi sebagaimana diharapkan dan sekaligus sebagai pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal.

Dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2023, beberapa arah dan kebijakan keuangan yang ditempuh Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar antara lain:

- a. Mengoptimalkan sumber daya manusia sarana dan prasarana yang ada
- b. Belanja daerah diupayakan untuk peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- c. Belanja daerah pada tiap kegiatan disertai tolok ukur dan target kinerjanya
- d. Belanja daerah dialokasikan untuk melaksanakan program, kegiatan sesuai dengan perencanaan strategis dan mengakomodasikan nilai-nilai yang berkembang dalam situasi yang berubah (dinamis)
- e. Belanja daerah dialokasikan secara efisien dan efektif mewujudkan sasaran kinerja.

3.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Adapun tugas-tugas urusan wajib di Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar pada Tahun 2023, disusunlah program-program Balitbang Kota Denpasar, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

APBD untuk Tahun 2023 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
		Tahun Anggaran 2023
1.	Pendapatan Daerah	-
2.	Belanja Daerah	
	- Belanja Langsung	8.787.716.587
	Jumlah Belanja	8.787.716.587

Pada Tahun Anggaran 2023, Jumlah Belanja Langsung pada Badan Penelitian dan Pengembangan yaitu sebesar Rp. 8.787.716.587.

BAB IV

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

4.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Tujuan strategis yang terkait dengan aspek keuangan antara lain bermakna bahwa Pemerintah Kota Denpasar hendak meningkatkan kemandirian daerah dalam mendanai seluruh kebutuhan belanjanya, maka dari itu ditetapkan strategi pencapaian tujuan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.

Pada bagian ini akan diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

No	Nama Sub Kegiatan	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.166.725.808	5.454.232.422	88.45%
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.000.000	3.000.000	100.00%
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.542.969	7.554.900	79.17%
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119.579.933	104.229.915	87.16%
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	133.226.635	115.767.100	86.89%
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	61.037.860	40.577.050	66.48%
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.405.000	9.405.000	100%
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.753.750	107.069.826	76.07%
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.325.000	56.150.000	94.65%

9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.500.000	112.086.317	90.76%
10	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.300.000	25.991.610	58.67%
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	844.120.541	833.000.512	98.68%
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.500.000	42.708.300	93.86%
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.350.000	103.204.800	77.98%
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.500.000	12.133.975	41.13%
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	9.795.220	97.95%
16	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	160.931.700	145.409.190	90.35%
17	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	81.082.200	80.478.520	99.26 %
18	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	106.557.845	103.665.800	97.29%
19	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	231.082.200	222.035.184	96.08%
20	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	166.087.389	116.491.990	70.14%
21	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	110.107.757	102.628.090	93.21%

Dari tabel diatas terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 980.100.866 dari jumlah anggaran sebesar Rp. 8.787.716.587 dan yang terealisasi sebesar Rp 7.807.615.721 atau 88.85%, untuk Belanja Langsung Pada Sub Kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar.

4.2. Pergeseran Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2023, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar melaksanakan 2 Program, 8 Kegiatan, dan 22 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 8.787.716.587, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar merasionalisasi anggaran:

1. Rasionalisasi pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Pada Belanja Tagihan Listrik terdapat kekurangan anggaran di bulan desember karena ada kenaikan pemakaian listrik.

BAB V

KEBIJAKAN AKUNTANSI

5.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Adapun entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah sampai Bulan Desember 2023 untuk Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Belanja Langsung

- Target Keuangan : Rp. 8.787.716.587,00
- Realisasi : Rp. 7.807.615.721 (88.85%)
- Sisa dana : Rp. 980.100.866,00

Sisa dana yang ada dalam pos belanja langsung yang bersumber dari APBD Kota Denpasar disebabkan karena:

- Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, hanya terealisasi sebesar 88.45 % yang disebabkan karena adanya mutasi dan pensiun pegawai.
- Pada Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan arahan dari BPKAD Kota Denpasar, untuk belanja makanan dan minuman rapat, tidak boleh diberikan konsumsi.
- Pada Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan , untuk belanja cetak sesuai dengan kebutuhan.
- Untuk belanja pemeliharaan: alat studio, komputer, AC, telepon di perbaiki sesuai dengan kerusakan.
- Belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan dilakukan pembayaran sesuai dengan belanja suku cadang dan sementara belum ada kerusakan.
- Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga, Sub Keg. Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi, Hadiah untuk pemenang kompetisi inovasi di ketiga kategori pemenangnya adalah OPD, jadi pos untuk hadiah di belanja barang tidak terealisasi dikembalikan sesuai dengan rancangan semula yang kami amprahkan hanya di belanja modal.

5.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Basis akrual

Merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

b. Basis Kas

Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.

5.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

5.4. Ringkasan Penerapan Kebijakan Akuntansi Akun yang Penting Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

5.4.1. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Dilihat dari bentuknya maka kas dan setara kas dapat dibagi dalam 3 klasifikasi besar yaitu:

- a. Uang tunai, terdiri dari uang kertas dan koin dalam mata uang rupiah yang dikuasai oleh pemerintah, termasuk didalamnya uang tunai dan koin dalam mata uang asing.

- b. Saldo simpanan di Bank, adalah seluruh saldo rekening pemerintah yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
- c. Setara kas, antara lain deposito pemerintah yang berumur 3 (tiga) bulan.

Kas di Bendahara pengeluaran adalah saldo uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran satuan kerja.

5.4.2. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh pemerintah dan/ atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

5.4.3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan /atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (perolehan dan pemakaian).

Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan.

5.4.4. Aset Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

5.4.5. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5.4.6. Aset Lain-lain

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Contoh: penghentian penggunaan aset tetap pemerintah dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

5.4.7. Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan terdiri dari pendapatan-LO dan Pendapatan LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

5.4.8. Belanja dan Beban

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya

kewajiban. sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual, merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional dan menggunakan kode akun 9.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh bendahara umum daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas, merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan menggunakan kode akun 5.

Beban dan belanja diklasifikasi menurut klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain seperti beban tak terduga. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar maupun telah menimbulkan kewajiban dan disajikan dalam Laporan Operasional sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau rekening bendahara pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan. Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.

BAB VI

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

6.1 Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

6.1.1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA termasuk transfer penerimaan dari entitas pelaporan lain misalnya dana perimbangan dan dana bagi hasil. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar tidak mengelola anggaran Pendapatan-LRA.

6.1.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Belanja Daerah dengan target anggaran sebesar Rp. 8.787.716.587,00 dan realisasinya sebesar Rp. 7.807.615.721,00 atau 88,85%.

Rincian atas jumlah realisasi belanja dengan anggarannya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	8.692.391.587,00	7.725.965.721,00	88.88
	- Belanja Pegawai	6.169.725.808,00	5.457.232.422,00	88.45
	- Belanja Barang/Jasa	2.522.665.779,00	2.268.733.299,00	89.93
2.	Belanja Modal	95.325.000,00	81.650.000,00	85.65
	Jumlah	8.787.716.587,00	7.807.615.721,00	88.85

Jika dibandingkan dengan Tahun 2022, Realisasi Belanja Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0.73% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/Turun	
	2023	2022	Rp	%
Belanja Operasi	7.725.965.721,00	7.624.159.768,00	101.805.953,00	1.34
Belanja Pegawai	5.457.232.422,00	5.925.897.779,00	(468.665.357,00)	(7.91)
Belanja Barang/Jasa	2.268.733.299,00	1.698.261.989,00	570.471.310,00	33.59
Belanja Modal	81.650.000,00	126.610.000	(44.960.000,00)	(35.51)
Jumlah	7.807.615.721,00	7.750.769.768,00	56.845.953,00	0.73

6.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dengan Realisasi Tahun 2023 sebesar Rp. 7.725.965.721,00 dari anggaran sebesar 8.692.391.587,00 atau 88.88% dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.457.232.422,00 dan Rp. 5.925.897.779,00. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar (7.91)% dari Tahun 2022.

Uraian	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/Turun	
	2023	2022	Rp	%
Gaji Pokok ASN	1.821.302.740,00	1.967.504.000,00	(146.201.260,00)	(0.07)
Tunjangan Keluarga ASN	153.856.439,00	165.286.845,00	(11.430.406,00)	(0.07)
Tunjangan Jabatan ASN	83.650.000,00	92.470.000,00	(8.820.000,00)	(0.10)
Tunjangan Fungsional ASN	64.400.000,00	84.700.000,00	(20.300.000,00)	(0.24)
Tunjangan Fungsional Umum ASN	66.735.000,00	68.380.000,00	(1.645.000,00)	(0.02)
Tunjangan Beras ASN	88.352.400,00	94.540.300,00	(6.187.900,00)	(0.07)
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	32.588.923,00	35.728.363,00	29.677.258,00	0.83
Pembulatan Gaji ASN	27.167,00	29.054,00	1.589,00	0.05
Iuran Jaminan Kesehatan ASN	75.282.281,00	81.129.663,00	(5.847.382,00)	(0.07)
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.755.963,00	4.054.813,00	(298.850,00)	(0.07)

Iuran Jaminan Kematian ASN	11.267.789,00	12.164.362,00	(896.573,00)	(0.07)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.053.013.720,00	3.316.910.379,00	(263.896.659,00)	(0.08)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0,00
Jumlah	5.457.232.422,00	5.925.897.779,00	(468.665.357,00)	(7.91)

2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.268.733.299,00 dan Rp. 1.698.261.989,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 15,13% dibandingkan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022. Rincian Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/Turun	
	2023	2022	Rp	%
Belanja Barang	651.350.945,00	488.767.135,00	162.583.810,00	33,26
Belanja Jasa	1.398.780.929,00	1.106.765.458,00	292.015.471,00	26,38
Belanja Pemeliharaan	61.389.805,00	82.317.889,00	(20.928.084,00)	(25,42)
Belanja Perjalanan Dinas	119.831.620,00	20.411.507,00	99.420.113,00	487,08
Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	37.380.000,00	0	0	(100,00)
Jumlah	2.268.733.299,00	1.698.261.989,00	570.471.310,00	(15.13)

6.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 81.650.000,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp. 95.325.000,00 atau sebesar 85,65%. Realisasi belanja Modal Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 35.51% jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Modal Tahun 2022. Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Uraian	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/Turun	
	2023	2022	Rp	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.650.000,00	126.610.000,00	44.960.000,00	35.51
Jumlah	81.650.000,00	126.610.000,00	44.960.000,00	35.51

6.1.3. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah propinsi. Transfer keluar adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

Badan Penelitian dan Pengembangan kota Denpasar pada Tahun Anggaran 2023 tidak melakukan kegiatan transfer baik itu transfer masuk maupun transfer keluar.

6.1.4. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar pada Tahun Anggaran 2023 tidak melakukan penerimaan pembiayaan.

6.1.5. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar pada Tahun Anggaran 2023 tidak melakukan pengeluaran pembiayaan.

6.1.6. SILPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah sisa lebih antara realisasi Pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Sisa lebih anggaran tahun sebelumnya yang menjadi penerimaan pada tahun berjalan merupakan sumber penerimaan internal Pemda yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan tahun berjalan. Bentuk penggunaan SILPA ada dua, yakni; (1) untuk melanjutkan kegiatan yang belum selesai dikerjakan pada tahun sebelumnya (luncuran) dan (2) membiayai kegiatan baru yang tidak teranggarkan dalam APBD murni.

6.2. Pos-Pos Neraca

6.2.1. Aset

Saldo Aset Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar per 30 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 249.909.154,00 dan Rp. 341.690.802,44 dengan rincian sebagai berikut ini:

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Aset Lancar	49.932.430,00	38.184.078,44
Aset Tetap	199.976.724,00	303.506.724,00
Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	249.909.154,00	341.690.802,44

6.2.1.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 49.932.430,00 dan Rp. 38.184.078,44. Aset Lancar pada tabel di atas tersusun atas Persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Persediaan		
Bahan Bakar dan Pelumas	28.780.000,00	18.020.000,00
Alat Tulis Kantor	6.961.980,00	2.449.148,00
Bahan Cetak	0	10.276.000,00
Benda Pos	1.050.000,00	150.000,00
Perabot Kantor	929.450,00	1.287.797,58,00
Alat Listrik	1.483.500,00	959.983,50
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	67.000,00	137.640,00
Bahan Komputer	10.660.500,00	4.903.509,36
Jumlah	49.932.430,00	38.184.078,44

6.2.1.2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Adapun Nilai Aset Tetap per 30 Desember 2023 dan 2022 terinci pada tabel di bawah ini:

No.	Uraian	Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)	Neraca SKPD (Rp)	Perbedaan(Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
A.	ASET TETAP	3.044.539.871,84	3.044.539.871,84	2.850.986.171,84
	Tanah	-	-	-
	Peralatan dan Mesin	2.775.464.171,84	2.775.464.171,84	-
	Gedung dan Bangunan	-	-	-
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	Aset Tetap Lainnya	269.075.700,00	269.075.700,00	(2.816.555.147,84)
	Kontruksi dalam Pengerjaan			
B.	ASET LAINNYA	23.760.000,00	23.760.000,00	
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga			
	Aset Tidak Berwujud			
	Aset Lain-lain			

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. Nilai Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.775.464.171,84.

c. Gedung dan bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

d. Jalan, irigasi, dan jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

e. Aset tetap lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai termasuk aset tetap renovasi. Aset tetap lainnya yang dimiliki oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar Tahun 2023 yakni senilai Rp. 269.075.700,00

f. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 3.044.539.871,84

6.2.1.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya yang tersaji merupakan aset tidak berwujud, dimana nilainya yaitu sebesar Rp. 0 per 31 Desember 2023 dan Aset lain-lain sebesar Rp. 23.760.000,00.

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Aset Tidak Berwujud	0	2.500.000,00
Aset Lain-lain	23.760.000,00	(2.500.000,00)
Jumlah	23.760.000	0,00

6.2.2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Dalam Neraca Tahun 2023 dan 2022, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar memiliki kewajiban yang masing-masing sebesar Rp. 9.666.275,00 dan Rp. 9.924.462,00. Jumlah kewajiban untuk Tahun 2023 terdiri atas Utang Barang dan Jasa sebesar Rp. 9.666.275,00.

6.2.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam basis akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos

ekuitas. Ekuitas dalam neraca sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan senilai Rp. 240.242.879,00.

6.3. Pos-Pos Laporan Operasional

6.3.1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar tidak mengelola anggaran pendapatan-LO.

6.3.2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Daerah Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar Tahun 2023 sebesar Rp. 7.871.139.182,44 yang terdiri atas Beban Operasi serta Beban Penyusutan dan Amortisasi, dengan rincian sebagai berikut:

6.3.2.1. Beban Operasi

Beban Operasi Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, serta Beban Lain-Lain adalah sebesar Rp. 7.713.959.182,44 untuk Tahun 2023 dan Rp. 7.722.237.468,56 untuk Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut ini:

Uraian	Tahun		Naik/Turun	
	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Rp	%
Beban Operasi				
Beban Pegawai	5.457.232.422,00	5.922.584.323,00	(465.351.901,00)	(7.86)
Beban Barang dan Jasa	2.256.726.760,44	1.799.653.145,56	457.073.614,88	25.40
Beban Lain-Lain	0	0	0	0
Jumlah	7.713.959.182,44	7.722.237.468,56	(8.278.286,12)	(0.11)

1) Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.457.232.422,00 dan Rp. 5.922.584.323,00. Berikut adalah rinciannya:

Uraian	Tahun		Naik/Turun	
	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Rp	%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.401.218.702,00	2.602.673.944,00	(201.455.242,00)	(7.74)
Beban Tambahan Penghasilan ASN	3.053.013.720,00	3.316.910.379,00	(263.896.659,00)	(7.96)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	5.454.232.422,00	5.922.584.323,00	(465.351.901,00)	7.86

2) Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.256.726.760,44 dan Rp. 1.799.653.145,56 seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini:

Uraian	Tahun		Naik/Turun	
	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Rp	%
Beban Barang	639.602.593,44	586.772.656,56	52.829.936,88	9.00
Beban Jasa	1.398.522.742,00	1.110.151.093,00	288.371.649,00	25.98
Beban Pemeliharaan	61.389.805,00	82.317.889,00	(20.928.084,00)	(25.42)
Beban Perjalanan Dinas	119.831.620,00	20.411.507,00	(99,420,113,00)	487.08
Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	37.380.000,00	0	37.380.000,00	0
Jumlah	2.256.726.760,44	1.799.653.145,56	457.073.614,88	25.40

6.3.2.2. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 157.180.000,00 dan Rp. 172.187.108,84 dengan rincian sebagai berikut ini:

Uraian	Tahun		Naik/Turun	
	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Rp	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	129.597.750,00	152.653.859,84	(23.056.109,84)	(15.10)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	6.322.250,00	19.533.249,00	(13.210.999,00)	(67.63)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.500.000,00)	0	(2.500.000,00)	0

Beban Penyusutan Aset Lain-lain	23.760.000,00	0	23.760.000,00	0
Jumlah	157.180.000,00	172.187.108,84	(15.007.108,84)	(8.72)

6.4. Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Pada Laporan Perubahan Ekuitas Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar, Nilai Ekuitas untuk Tahun 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 476.238.838,44 dan Rp. 440.421.149,84. Berikut ini adalah rinciannya:

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.	Ekuitas Awal	331.766.340,44	440.421.149,84
2.	Surplus (Defisit) LO	(7.871.139.189,44)	(7.894.424.577,40)
3.	Dampak kumulatif perubahan kebijakan	7.779.615.721,00	7.785.769.768,00
4.	Koreksi Aset Tak Berwujud	(2.500.000,00)	-
5.	Koreksi Barang Masuk Antar OPD		320.000.000,00
6.	Koreksi Barang Keluar Antar OPD	(25.500.000,00)	(285.000.000,00)
7.	RK PPKD	7.807.615.721,00	7.750.769.768,00
	Ekuitas Akhir	240.242.879,00	331.766.340,44

6.4.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp. 240.242.879,00. Nilai ini merupakan nilai akhir ekuitas per 31 Desember 2023.

6.4.2. Surplus (Defisit) LO

Defisit LO merupakan selisih kurang antara jumlah pendapatan di LO dengan jumlah beban. Nilai Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 30 Desember 2022 Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar yakni sebesar Rp. (7.871.139.182,44).

6.4.3. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 30 Desember 2022 adalah sebesar Rp 240.242.879,00

BAB VII PENUTUP

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar merupakan salah satu entitas akuntansi dari Pemerintah Kota Denpasar yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan membuat Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Denpasar.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun 2023 Semester II dapat kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang Realisasi pendapatan dan belanja, berdasarkan laporan ini Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar tidak mengelola pendapatan. Realisasi Belanja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar pada tahun 2023 sebesar Rp. 7.807.615.721,00 atau 88.85% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 8.787.716.587,00.
2. Neraca per 31 Desember 2023 menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana. Dari Neraca diinformasikan ekuitas dana sebesar Rp. 240.242.879,00
3. Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang terdiri dari Pendapatan LO, beban atau surplus/defisit operasional. Untuk Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar tidak mengelola Pendapatan LO dimana Jumlah Beban Operasional Tahun 2023 sebesar Rp. 7.871.139.182,44 terdapat defisit sebesar (Rp. 7.871.139.182,44).
4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit LO, koreksi dan ekuitas akhir dimana ekuitas akhir pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar untuk tahun 2022 sebesar Rp. 240.242.879,00.
5. Catatan atas laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Denpasar, 31 Desember 2023

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kota Denpasar



I Made Pasek Mandira, SE., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19661011 199503 1 001

STRUKTUR ORGANISASI

